

**HUBUNGAN HUKUM BIDAN TERHADAP PASIEN DALAM
PELAKSANAAN PELAYANAN PERSALINAN
(Studi Kasus Puskesmas Kandeman, Batang)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

Emma Amalia

C100160298

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**HUBUNGAN HUKUM BIDAN TERHADAP PASIEN DALAM
PELAKSANAAN PELAYANAN PERSALINAN
(STUDI KASUS PUSKESMAS KANDEMAN, BATANG)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

EMMA AMALIA

C100160298

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing






(Dr. Rizka, S.Ag., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN
HUBUNGAN HUKUM BIDAN TERHADAP PASIEN DALAM
PELAKSANAAN PELAYANAN PERSALINAN

OLEH
EMMA AMALIA
C 100 160 298


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jumat, 4 September 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

- | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|
| 1. Dr. Rizka, S.Ag., M.H | (|  |) |
| (Ketua Dewan Penguji) | | | |
| 2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H | (|  |) |
| (Anggota I Dewan Penguji) | | | |
| 3. Nuswardhani, S.H., SU | (|  |) |
| (Anggota II Dewan Penguji) | | | |

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum

NIK.537 / NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 26 Juli 2020

Penulis



EMMA AMALIA

C100160298

**HUBUNGAN HUKUM BIDAN TERHADAP PASIEN DALAM
PELAKSANAAN PELAYANAN PERSALINAN (STUDI KASUS
PUSKESMAS KANDEMAN, BATANG)
(Studi Kasus Puskesmas Kandeman, Batang)**

Abstrak

Sekarang ini pelayanan persalinan normal dapat ditolong oleh seorang bidan yang dilaksanakan di Puskesmas. Dalam pelaksanaan proses persalinan normal tentunya terdapat perjanjian antara pihak bidan terhadap pasien. Meskipun persalinan yang dilakukan secara normal, namun bidan harus berusaha agar tindakan yang dilakukan sesuai dengan sop, sehingga tindakan persalinan yang dilakukan berhasil dengan baik. Pelaksanaan perjanjian persalinan ini melahirkan suatu kesepakatan sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian persalinan antar bidan dan pasien, dan mengetahui ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan perjanjian persalinan. Metode pendekatan yang digunakan berdasarkan penelitian hukum adalah menggunakan pendekatan normatif dengan meneliti tentang asas-asas hukum, kaedah-kaedah atau peraturan hukum dalam pelaksanaan perjanjian persalinan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang sifatnya memberikan gambaran yang sistematis dan menyeluruh tentang tanggung jawab bidan terhadap pasien dalam pelaksanaan perjanjian pelayanan kesehatan dalam proses persalinan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam prosedur pelaksanaan perjanjian persalinan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, syarat keabsahan, syarat pendaftaran, syarat pemberian informed consent, dan syarat pemeriksaan kesehatan. Kemudian kesepakatan terjadi dengan penandatanganan formulir persetujuan tindakan medis oleh pihak pasien setelah pasien mendapatkan penjelasan-penjelasan informasi yang terdapat dalam informed consent.

Kata Kunci: persalinan normal, pelaksanaan perjanjian antara bidan dan pasien, informed consent

Abstract

Currently a normal delivery service can be helped by a midwife who is carried out at the Puskesmas. In carrying out the normal delivery process there must be an agreement between the midwife and the patient. Although childbirth is done normally, but the midwife must try to make the actions carried out in accordance with the soup, so that the labor performed successfully. Implementation of this labor agreement gave birth to an agreement in accordance with the provisions of article 1320 of the Civil Code. The purpose of this study was to determine the process of carrying out a labor agreement between midwives and patients, and to know the provisions of the legislation governing the delivery of a labor agreement. The method of approach used based on legal research is to use a normative approach by examining the principles of law, methods or legal regulations in the implementation of labor agreements. This research is descriptive in nature which gives a systematic and comprehensive picture of midwives' responsibilities to patients in implementing health care agreements in the delivery

process. The results of the study mentioned that in the procedure of implementing a labor agreement must meet the provisions of the legislation, legal requirements, registration requirements, conditions for giving informed consent, and health examination requirements. Then an agreement occurs with the signing of the medical action consent form by the patient after the patient gets an explanation of the information contained in the informed consent.

Keywords: normal labor, implementation of the agreement between the midwife and the patient, informed consent

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia sekarang ini pelayanan persalinan ibu hamil dapat ditolong oleh seorang bidan dan dapat dilaksanakan di puskesmas. Persalinan normal merupakan proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar yang terjadi pada kehamilan yang cukup bulan (37-42 minggu) dengan ditandai adanya kontraksi uterus yang menyebabkan terjadinya penipisan, dilatasi serviks, dan mendorong janin keluar melalui jalan lahir dengan presentase belakang kepala tanpa alat atau bantuan serta tidak ada komplikasi pada ibu dan janin. Terjadinya persalinan normal bukan berarti tidak ada permasalahan dalam persalinan, tetapi melainkan banyak kemungkinan hal yang bisa terjadi dimana dinamakan dengan komplikasi pada saat persalinan (Firdayanti dan Nadyah, 2019). Maka dari itu setiap tindakan persalinan yang dilakukan oleh bidan diperlukan komunikasi terapeutik terhadap pasien.

Setiap kehamilan dan proses persalinan tentunya terdapat komunikasi terapeutik. Dalam komunikasi terapeutik ini timbul hubungan antara bidan dan pasien. Hubungan hukum (perikatan) antara bidan dengan pasien terbentuk atas dasar perjanjian atau undang-undang (pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Perikatan persetujuan antara bidan dengan pasien melahirkan yang disebut *Informed Consent*. Bidan berperan untuk memfasilitasi pilihan pasien. Ketika proses kelahiran, tantangan bidan sangat beragam yang berasal dari masyarakat. Hambatan lain yang dialami bidan salah satunya bersumber dari keterbatasan pilihan dari fasilitas pelayanan yang tersedia, oleh karena itu keamanan, keselamatan dan kesejahteraan wanita dan bayinya menjadi pertimbangan utama bagi para bidan. Informasi dan pilihan wajib diberikan

kepada pasien dengan informasi yang sebenar-benarnya dan pilihan pelayanan tepat untuk kesejahteraan pasien (Arimbi, 2014).

PMK Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 menyatakan bahwa persetujuan tindakan medis (*Informed Consent*) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Untuk menyetujui tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan, pasien harus diberi penjelasan terlebih dahulu tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan yang direncanakan, karena diperlukan suatu keputusan persetujuan (Wardhani, 2014).

Dalam peraturan Undang-Undang pasal 68 No 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menyebutkan bahwa penjelasan *informed consent* sekurang-kurangnya mencakup diagnosis, tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain, dan prognosis.

Dilihat dari kedudukan para pihak, maka *informed consent* merupakan syarat subjektif untuk terjadinya hubungan hukum antara bidan dan pasien yang bertumpu pada dua jenis hak asasi atas informasi dan hak asasi untuk menentukan nasib sendiri. Praktik pelaksanaan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) di lapangan masih mengalami berbagai permasalahan. Seperti permasalahan kelengkapan formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*), kurangnya pengetahuan sehingga pasien tidak memahami, ataupun sebaliknya bidan yang terkadang tidak memberikan informasi kepada pasien mengenai *informed consent*.

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana prosedur yang dilakukan antara bidan dan pasien di puskesmas kandeman dalam pelaksanaan perjanjian persalinan? (2) Bagaimana kesesuaian pelaksanaan perjanjian persalinan di puskesmas kandeman menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Permenkes No 290 tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran?.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian persalinan antar bidan dan pasien (2) Untuk mengetahui ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan perjanjian persalinan.

Manfaat penelitian ini adalah: (1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya di bidang perdata (2) Dapat memberikan tambahan pembendaharaan literature sehingga dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian mengenai hal yang sama (3) Diharapkan masyarakat maupun pembaca dapat mengetahui lebih jauh mengenai tanggung jawab bidan dan pasien terhadap pelaksanaan perjanjian pelayanan kesehatan dalam proses persalinan.

2. METODE

Secara metodologis, Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu penelitian yang mencakup asas-asas hukum, kaedah-kaedah atau peraturan hukum dalam pelaksanaan perjanjian persalinan. Hukum merupakan perilaku-perilaku manusia secara aktual telah dan/atau potensial akan terpola. Karena penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat (Ali, 2016).

Lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Puskesmas Kandeman, Batang, yang mana sesuai dengan penelitian yang penulis susun, sehingga memudahkan dalam pencarian guna memperoleh data.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: (1) Data sekunder merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui Pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen internet yang berkaitan dengan objek penelitian ini dan (2) Data primer merupakan sejumlah data keterangan atau fakta yang secara langsung didapatkan melalui penelitian lapangan, dalam hal ini data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Puskemas Kandeman, Batang.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, yaitu: (1) Studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan, mencari, mempelajari dan menginventaris buku-buku dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahannya. (2) Studi lapangan, pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kelapangan atau tempat dimana objek berada, guna mendapat data primer yang disesuaikan dengan sumber-sumber pada data kepustakaan dalam tahap awal. (3) Wawancara,

pengumpulan data dengan jalan melakukan wawancara dengan narasumber melalui pengajuan daftar pertanyaan untuk memperoleh data primer. Wawancara yang dilakukan dengan pihak Puskesmas Kandeman, Batang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Prosedure Pelaksanaan Perjanjian Persalinan Antara Bidan dan Pasien di Puskesmas Kandeman

Keabsahan Perjanjian Persalinan. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga diakui oleh hukum seperti pada Pasal 1320 KUH Perdata. Adapun syarat sahnya perjanjian tindakan persalinan pada pasien melahirkan adalah sebagai berikut: Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri. Perjanjian tindakan persalinan yang dilakukan oleh bidan pada pasien melahirkan di Puskesmas Kandeman pada dasarnya merupakan perjanjian konsensual, karena perjanjian persalinan ini timbul berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Kecakapan hukum. Setiap orang yang sudah dewasa pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam surat persetujuan tindakan medis, pihak pasien atau keluarganya harus mengisi data diri terlebih dahulu, sehingga dapat diketahui cakap atau tidak untuk mengadakan suatu perjanjian.

Suatu hal tertentu. Di dalam perjanjian persalinan yang merupakan suatu hal tertentu adalah tindakan medis yang dilakukan oleh bidan kepada pasien pada proses persalinan itu sendiri. Berdasarkan hasil data yang didapat di Puskesmas Kandeman, dapat diketahui bahwa adanya dua jenis formulir perjanjian/*informed consent* yaitu :

Surat Persetujuan Tindakan Medis. Merupakan persetujuan antara tenaga kesehatan bidan dengan pasien yang menyatakan bahwa pasien bersedia untuk dilakukannya tindakan pelayanan persalinan oleh bidan.

Surat Penolakan Tindakan Medis. Merupakan kesepakatan antara pasien/pihak keluarga pasien dengan bidan mengenai penolakan terhadap tindakan medis persalinan yang akan dilakukan oleh bidan. Hal ini dijadikan sebagai bukti nantinya apabila terjadi sesuatu.

Suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu. Perjanjian persalinan terjadi karena pihak yaitu pasien/keluarga dan bidan telah memahami dan mengerti isi dari perjanjian tersebut. Maka dari itu para pihak dapat mengetahui apakah isi dari perjanjian atau persetujuan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan dan tidak menyimpang undang-undang, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Tahapan pelaksanaan perjanjian persalinan. Tahap pendaftaran. Tahap pendaftaran merupakan tahap paling awal yang dimulai dengan pasien datang ke Puskesmas Kandeman untuk mendaftarkan diri di ruang pendaftaran. Pendaftaran ini dilakukan untuk menyatakan bahwa pasien telah bersedia melakukan pengobatan di Puskesmas Kandeman

Tahap pemeriksaan. Tahap pemeriksaan yang dilakukan dari suatu percakapan antara bidan dengan pasien secara langsung untuk mengetahui kondisi kesehatan, dan memperoleh data pasien beserta keluhan medisnya. Tahap pemeriksaan ini dilakukan di RB (Ruang Bersalin) Puskesmas Kandeman

Tahap pemberian informed consent. *Informed Consent* tersebut harus diberikan secara benar, jujur serta tidak bermaksud untuk menakut-nakuti atau bersifat memaksa. Pemberian *informed consent* disamping merupakan kewajiban bagi bidan juga merupakan hak bagi pasien. Adapun penjelasan yang diberikan oleh bidan adalah sebagai berikut: Prosedur medis yang akan dilakukan Risiko dari tindakan bidan pada pasien melahirkan. Penjelasan tentang tujuan tindakan bidan pada pasien melahirkan Alternatif tindakan lain, penjelasan mengenai prognosis dan biaya.

Tahap persetujuan dan penandatanganan. Setelah mendapat informasi yang cukup jelas, kemudian pasien diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan. Setelah mempertimbangkan pasien akan memberikan keputusan yang terdiri dari dua kemungkinan keputusan yaitu sebagai berikut: apabila pasien menolak untuk dilakukan tindakan persalinan yang dilakukan oleh bidan, meskipun telah mendapatkan penjelasan dari bidan mengenai konsekuensi penolakan tindakan, maka pasien diharuskan mengisi dan menandatangani surat penolakan. Hal tersebut agar jika terjadi sesuatu di kemudian hari, bidan tidak dipersalahkan atas hal tersebut.

Pasien yang memutuskan menerima untuk menjalani tindakan persalinan yang dilakukan oleh bidan, maka antara pasien dan bidan mengadakan suatu perjanjian untuk melakukan suatu tindakan persalinan yang akan dilakukan oleh bidan terhadapnya. Pasien atau keluarga yang telah setuju diharuskan: Mengisi identitas dengan jelas, mengisi identitas keluarga terdekat dengan pasien yang berwenang memberi persetujuan/ijin dan selanjutnya menuliskan hubungan dengan pasien tersebut (sebagai suami, orang tua, anak, atau wali), Menandatangani dan mencantumkan nama jelas pada kolom tersedia.

Tujuan dari dilakukannya tindakan persalinan yang dilakukan oleh bidan kepada pasien adalah sembuhnya pasien setelah dikeluarkan bayi yang dikandung. Dengan dikeluarkannya bayi tersebut, maka perjanjian tersebut telah berakhir.

3.2 Kesesuaian Pelaksanaan Perjanjian Persalinan di Puskesmas Kandeman menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Permenkes Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Formulir persetujuan tindakan medis/*Informed Consent* terdapat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan. Berikut peraturan-peraturan yang mengatur ketentuan formulir persetujuan tindakan medis/*informed consent*. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyebutkan bahwa: Setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorang yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat penjelasan secara cukup dan patut. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup: tata cara tindakan pelayanan; tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan; alternatif tindakan lain; risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan, baik secara tertulis maupun lisan. Setiap tindakan Tenaga Kesehatan yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Permenkes Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Bab II (Persetujuan dan Penjelasan). Pasal 2 ayat (1): Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Pasal 2 ayat (2) : persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.

Pasal 2 ayat (3): persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan. Pasal 7 ayat (1): penjelasan tentang tindakan kedokteran harus diberikan langsung kepada pasien dan/atau keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta. Pasal 7 ayat (2): dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar, penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar.

Pasal 7 ayat (3): penjelasan tentang tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup: diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan, alternatif tindakan lain, dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, perkiraan pembiayaan.

Sebelum bidan melakukan tindakan medis persalinan, bidan berkewajiban untuk memberikan informasi atau penjelasan-penjelasan terkait tindakan persalinan yang akan dilakukan serta resiko yang mungkin timbul dari tindakan tersebut kepada pasien dan keluarganya. Prosedur tetap dalam pengambilan tindakan medis yang bersifat tetap dan mengikat adalah adanya persetujuan pasien untuk pengambilan tindakan medis. Penerimaan dari pasien tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk persetujuan tindakan medis/*informed consent*.

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa *Informed Consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus mendapat persetujuan.

Atas dasar ketentuan tersebut, maka bidan terhadap pasien berkewajiban untuk: memberikan penjelasan secara lisan terhadap pasien yang meliputi: diagnosis dan tata cara tindakan medis tujuan tindakan medis yang dilakukan alternatif tindakan lain dan resikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi prognosis (kemungkinan hasil perawatan) terhadap tindakan yang dilakukan, perkiraan pembiayaan, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh bidan kepada pasien adalah sebagai berikut :

Bidan menyampaikan mengenai diagnosa yang diperoleh dari hasil pemeriksaan atau yang biasa disebut dengan data anamnesis. Yang kemudian di catat dalam formulir resume klinis dan kajian awal klinis. Diagnosa yang disampaikan telah diisi dengan lengkap dan benar.

Tindakan medis dalam pelayanan persalinan di puskesmas kandeman adalah penyuntikan oksitocin, pemasangan infus, penjahitan luka perinium dan pemberian imunisasi TT. Bidan telah menyampaikan tujuan tindakan ini agar pasien atau yang mewakili bisa memahami tentang tujuan dari tindakan yang akan dilakukan, serta indikasi tindakan dan tata cara tindakan.

Apabila ketika proses persalinan berlangsung terdapat komplikasi pada pasien, maka tindakan alternatif lain yang dilakukan oleh bidan kepada pasien adalah melakukan rujukan ke rumah sakit untuk penanganan yang lebih aman. Namun, terkait penjelasan alternatif tindakan lain ini tidak disampaikan oleh bidan kepada pasien.

Informasi tentang risiko tindakan disampaikan oleh bidan kepada pasien, tetapi hanya secara garis besarnya. Informasi tidak diberikan secara detail, misalnya tentang proses terjadinya komplikasi pada penjahitan jalan lahir. Apabila informasi yang diberikan secara detail atau mendalam dikhawatirkan pasien sebagai penerima informasi sulit memahami penjelasan yang diberikan. Hal ini sesuai Pasal 9 Permenkes Nomer 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Dokter yang menyebutkan bahwa penjelasan diberikan dengan bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman.

Informasi tentang prognosis disampaikan kepada pasien, dan disesuaikan dengan tindakan kebidanan oleh bidan. Salah satu contoh pemberian informasi prognosis adalah keberhasilan dari tujuan tindakan pemasangan infus.

Bidan tidak menyampaikan perkiraan pembiayaan kepada pasien. Hal ini menyebabkan pasien tidak bisa memperkirakan biaya persalinan yang harus dikeluarkan. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri (Permenkes) nomor 290 tahun 2008 pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa adanya perkiraan pembiayaan dalam persetujuan tindakan medis (informed consent).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bahwa proses atau prosedur pelaksanaan perjanjian persalinan yang dilakukan oleh bidan terhadap pasien di Puskesmas Kandeman sudah memenuhi syarat sah nya perjanjian , baik dari syarat pendaftaran, syarat pemeriksaan kesehatan, serta syarat pemberian informed consent. Hal ini pelaksanaan perjanjian persalinan sudah sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mana terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan oleh orang yang sudah cakap atau dewasa. Suatu hal tertentu dalam isi perjanjian tidak melanggar undang-undang. Dalam hal ini apabila bidan di Puskesmas Kandeman akan melakukan tindakan pelayanan persalinan maka bidan harus melakukan perjanjian terhadap pasien yang kemudian pasien menyatakan setuju atau menolak untuk segala tindakan medis persalinan yang akan dilakukan oleh bidan di Puskesmas Kandeman. Serta tindakan persalinan yang diberikan oleh bidan Puskesmas Kandeman sudah sesuai dengan standard operasional prosedur.

Kesesuaian pelaksanaan perjanjian persalinan di Puskesmas Kandeman sudah baik secara yuridis jika dilihat dari formulir, karena telah memenuhi unsur pokok yang harus terkandung dalam informasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan pasal 7 ayat (3) Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pada dasarnya persetujuan Tindakan medis sebenarnya lebih mengarah kepada proses komunikasi bidan terhadap pasien, bukan semata-mata pengisian dan penandatanganan formulir. Kesesuaian

pelaksanaan perjanjian persalinan jika dilihat dari pemberian informasi dalam prakteknya masih terdapat kekurangan yaitu tidak semua cakupan informasi disampaikan, hal ini kurang memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan pasal 7 ayat (3) Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

4.2 Saran

Dalam pelaksanaan perjanjian persalinan pihak bidan harus lebih aktif mensosialisasikan kepada pasien bahwa prosedur yang diberikan kepada pasien guna untuk kepentingan bersama, dengan menerima semua kesepakatan maka bidan akan menjalankan apa yang sesuai dengan kesepakatan.

Secara garis besar formulir yang telah ada sudah memenuhi ketentuan secara yuridis, namun dalam prakteknya harus terdapat kelengkapan dalam pengisian formulir informed consent seperti tanda bukti pengenalan pasien, tanda tangan pihak bidan, serta tanda tangan saksi. Selain itu perlu disebutkan siapa saja yang berhak menjadi saksi. Adanya saksi yang salah satunya dari pihak bidan atau tenaga medis lain dari Puskesmas sangat diperlukan untuk memperkuat kesaksian di pengadilan apabila terjadi sengketa dengan pihak pasien. Serta dalam pemberian penjelasan informasi dalam Informed Consent, pihak bidan harus menyampaikan semua cakupan informasi yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan bahasa yang mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimbi, Diah. (2014). *Etikolegal Kebidanan*, Yogyakarta: Pustaka Rihama
- Ali, Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ida Ayu Sri Kusuma Wardhani. (2014). *“Implementasi Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) dalam Perjanjian Terapeutik oleh Tenaga Kesehatan terhadap Pasien Rumah Sakit di Provinsi Bali”*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 3 No 1
- Indah, Firdayanti & Nadyah. (2019). *“Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny “N” dengan Usia Kehamilan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 01 Juli 2018”*, Jurnal Midwifery, Vol 1 No 1